



---

**KLIPING DIGITAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**

**04 – 05 September 2023**

---



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

05 / 09 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	<b>TANGGAL</b>  <b>MEDIA</b>  <b>JUDUL</b>  <b>NARASUMBER</b> <b>RESUME</b>	<p>Senin, 04 September 2023</p> <p><a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20230904135209-4-468942/dana-flpp-capai-rp164-t-146000-rumah-murah-sukses-dibangun">https://www.cnbcindonesia.com/news/20230904135209-4-468942/dana-flpp-capai-rp164-t-146000-rumah-murah-sukses-dibangun</a></p> <p>Dana FLPP Capai Rp16,4 T, 146.000 Rumah Murah Sukses Dibangun</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Dedy Syarif Usman</p> <p>Pemerintah Presiden Joko Widodo terus mengejar penurunan angka backlog perumahan yang hingga saat ini masih di angka 12,72 juta. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga 31 Agustus, dana FLPP yang telah disalurkan sebesar Rp 16,474 triliun. Dana tersebut diklaim berhasil dipakai untuk menyediakan 146.123 rumah bagi MBR. Ratusan ribu rumah subsidi tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bekasi adalah wilayah yang paling banyak menerima penyaluran FLPP, yakni sebanyak 11.650 rumah; Karawang di posisi kedua dengan 5.689 rumah; lalu Bogor mencapai 4.910 rumah; Tangerang 3.964 rumah; dan Deli Serdang 3.951 rumah. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Dedy Syarif Usman mengklaim dana FLPP yang dikelola oleh BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Infrastruktur (SMF) dalam lima tahun terakhir telah berhasil menekan angka backlog perumahan di Indonesia.</p>	+
2	<b>TANGGAL</b>  <b>MEDIA</b>  <b>JUDUL</b>  <b>NARASUMBER</b>	<p>Senin, 04 September 2023</p> <p><a href="https://www.kompas.com/properti/read/2023/09/04/210000021/pemerintah-pastikan-rumah-subsidi-dibangun-di-lokasi-yang-aman?page=all">https://www.kompas.com/properti/read/2023/09/04/210000021/pemerintah-pastikan-rumah-subsidi-dibangun-di-lokasi-yang-aman?page=all</a></p> <p>Pemerintah Pastikan Rumah Subsidi Dibangun di Lokasi yang Aman</p> <p>Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna</p>	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

05 / 09 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

	<b>RESUME</b>	Pemerintah memastikan rumah yang diberikan fasilitas kemudahan dan bantuan dibangun di lokasi yang aman, seperti tidak berada di area ruang bebas dan jarak bebas minimum Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna. Sebagai informasi, aturan mengenai ruang bebas dan jarak bebas minimum SUTET telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.	
3	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b> <b>RESUME</b>	Senin, 04 September 2023 <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20230904/47/1691201/singapura-dan-malaysia-minat-investasi-di-ikn-ini-proyek-yang-diincar">https://ekonomi.bisnis.com/read/20230904/47/1691201/singapura-dan-malaysia-minat-investasi-di-ikn-ini-proyek-yang-diincar</a> Singapura dan Malaysia Minat Investasi di IKN, Ini Proyek yang Diincar Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Haryo Bakti Martoyoedo Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa dua negara anggota Asean yaitu Singapura dan Malaysia telah menyatakan minat untuk investasi di IKN. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Haryo Bakti Martoyoedo, sebelumnya menuturkan bahwa konsorsium Nusantara juga saat ini tengah melangsungkan studi kelayakan sebelum melaksanakan groundbreaking. Dirinya juga menjelaskan, secara garis besar, apartemen yang akan dibangun oleh dua konsorsium swasta ini akan memiliki desain dasar yang sama seperti 47 rusun ASN yang akan dibangun oleh pemerintah melalui APBN.	+
4	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b>	Senin, 04 September 2023 <a href="https://pu.go.id/kanal-gallery/2349">https://pu.go.id/kanal-gallery/2349</a>	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

05 / 09 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

	<b>JUDUL</b>	Road to The 10 th World Water Forum 2024, Sekjen Kementerian PUPR Sampaikan Pentingnya Kolaborasi Pembiayaan Sektor Air	
	<b>NARASUMBER</b>	Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna	
	<b>RESUME</b>	Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah mengatakan salah satu tantangan dalam pengelolaan sumber daya air adalah kemampuan pendanaan pemerintah yang terbatas dan terdapat funding gap. Sesungguhnya pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan APBN hanya sekitar 30 persen, sehingga kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi hal penting untuk memenuhi funding gap sektor sumber daya air. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, permasalahan air merupakan isu yang besar, dibandingkan dengan sektor lain, sektor air memerlukan perhatian khusus, dimulai dari kepastian tarif, koordinasi antar stakeholder dan juga perlu perubahan pendekatan kaitannya dengan bundling agar menciptakan ekonomi sirkular. Kendala utama dalam mencapai water for all adalah kesenjangan kebutuhan pendanaan dengan anggaran publik yang tersedia. Data menunjukkan terdapat funding gap untuk sektor air sebesar 70,4% dari 41 negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendanaan merupakan tantangan yang dihadapi secara global.	
5	<b>TANGGAL</b>	Senin, 04 September 2023	+
	<b>MEDIA</b>	<a href="https://www.inilah.com/indonesia-kekurangan-127-juta-rumah-pengembang-makin-pede-garap-mbr">https://www.inilah.com/indonesia-kekurangan-127-juta-rumah-pengembang-makin-pede-garap-mbr</a>	
	<b>JUDUL</b>	Indonesia Kekurangan 12,7 Juta Rumah, Pengembang Makin Pede Garap MBR	
	<b>NARASUMBER</b>	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna	



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

05 / 09 / 2023

| Analisis Pemberitaan Media Online

---

RESUME
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, tahun ini, angka backlog di Indonesia mencapai 12,71 juta unit. Tingginya angka backlog terjadi oleh beberapa faktor, namun yang paling umum penyebabnya adalah kesenjangan lebar antara proses pembangunan fisik rumah dengan populasi penduduk yang setiap tahun meningkat.



04 / 09 / 2023

Sumber: cnbcindonesia.com

---

## **Dana FLPP Capai Rp16,4 T, 146.000 Rumah Murah Sukses Dibangun**

Author: Rosseno Aji Nugroho

**Jakarta, CNBC Indonesia** - Pemerintah Presiden Joko Widodo terus mengejar penurunan angka backlog perumahan yang hingga saat ini masih di angka 12,72 juta.

Upaya menekan angka backlog itu salah satunya dengan penyaluran pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Berdasarkan data yang dihimpun dari situs Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga 31 Agustus, dana FLPP yang telah disalurkan sebesar Rp 16,474 triliun. Dana tersebut diklaim berhasil dipakai untuk menyediakan 146.123 rumah bagi MBR.

Ratusan ribu rumah subsidi tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Bekasi adalah wilayah yang paling banyak menerima penyaluran FLPP, yakni sebanyak 11.650 rumah; Karawang di posisi kedua dengan 5.689 rumah; lalu Bogor mencapai 4.910 rumah; Tangerang 3.964 rumah; dan Deli Serdang 3.951 rumah.

Lebih lanjut dari data BP Tapera, disebutkan bahwa mayoritas masyarakat yang memanfaatkan program FLPP adalah swasta 82,22%, wiraswasta 8,19%, PNS 3,17%, TNI/Polri 3,17% dan lainnya 4,25%.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Dedy Syarif Usman mengklaim dana FLPP yang dikelola oleh BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Infrastruktur (SMF) dalam lima tahun terakhir telah berhasil menekan angka backlog perumahan di Indonesia.

Dedy mengatakan selain kepemilikan rumah, bantuan dari pemerintah itu juga sudah bisa menekan angka rumah tidak layak huni dari 32 juta pada 2017 menjadi 29 juta pada 2021.

"Dukungan pemerintah dari APBN cukup besar," kata dia dikutip pada Senin, (4/9/2023).

FLPP merupakan bantuan pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Sejak diluncurkan pada 2010, total dana yang telah disalurkan sebesar Rp 108,5 triliun.

Masyarakat yang berhak mendapatkan FLPP adalah yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta, dengan bunga flat 5% dan tenor 20 tahun.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230904135209-4-468942/dana-flpp-capai-rp164-t-146000-rumah-murah-sukses-dibangun>



04 / 09 / 2023

Sumber: Kompas.com

---

## **Pemerintah Pastikan Rumah Subsidi Dibangun di Lokasi yang Aman**

Penulis: Aisyah Sekar Ayu Maharani

Editor: Hilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan rumah yang diberikan fasilitas kemudahan dan bantuan dibangun di lokasi yang aman, seperti tidak berada di area ruang bebas dan jarak bebas minimum Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna.

"Ketika dia memenuhi itu (masuk dalam zona berbahaya SUTET) ya tidak kita sarankan untuk menjadi rumah, terutama yang diberikan fasilitas kemudahan dan bantuan," ucap Herry saat ditemui usai acara Neighborhood Densification di Jakarta, Selasa (29/8/2023). Sebagai informasi, aturan mengenai ruang bebas dan jarak bebas minimum SUTET telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Aturan tersebut mencabut Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2019, Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2018, dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2015.

Berikut aturannya:

1. SUTT 66 kV tiang baja memiliki ruang bebas 4 meter,
2. SUTT 66 kV tiang beton memiliki ruang bebas 4 meter,
3. SUTT 66 kV menara memiliki ruang bebas 7 meter,
4. SUTT 150 kV tiang baja memiliki ruang bebas 6 meter,
5. SUTT 150 kV tiang beton memiliki ruang bebas 5 meter,
6. SUTT 150 kV menara sirkuit ganda memiliki ruang bebas 10 meter,
7. SUTT 150 kV menara sirkuit empat memiliki ruang bebas 10 meter,
8. SUTET 275 kV menara sirkuit ganda memiliki ruang bebas 13 meter,
9. SUTET 500 kV menara sirkuit tunggal memiliki ruang bebas 22 meter,
10. SUTET 500 kV menara sirkuit ganda memiliki ruang bebas 17 meter,
11. SUTET 500 kV menara sirkuit empat vertikal memiliki ruang bebas 17 meter,
12. SUTET 500 kV menara sirkuit empat horizontal memiliki ruang bebas 30 meter,
13. SUTET 500 kV compact tower sirkuit ganda memiliki ruang bebas 14 meter,
14. SUTET 500 kV compact tower sirkuit empat vertikal memiliki ruang bebas 14 meter,
15. SUTET 500 kV tiang baja sirkuit ganda memiliki ruang bebas 14 meter, dan



04 / 09 / 2023

Sumber: Kompas.com

---

16. SUTET 500 kV tiang baja sirkuit empat memiliki ruang bebas 14 meter

Namun sayangnya, belum semua masyarakat di Indonesia bertempat tinggal di rumah yang lokasinya aman atau terbebas dari bahaya.

Merujuk publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Statistik Perumahan dan Permukiman 2022, terdapat beberapa lokasi rumah yang dinilai berbahaya.

Seperti, di bawah kabel listrik SUTET, di dalam radius 1 kilometer dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, di dalam radius 2 kilometer dari pabrik berpolusi, di pinggir rel kereta api kurang dari 15 meter, di tepian/atas sungai/danau/laut, serta di sekitar jalur landasan pesawat terbang.

Dari lokasi-lokasi itu, masyarakat paling banyak menempati rumah yang berada di tepian atau atas sungai/danau/laut dengan 4,44 persen.

Urutan kedua, lokasi rumah masyarakat berada di dalam radius 2 kilometer dari pabrik berpolusi, jumlahnya 2,96 persen.

Kemudian, terdapat 1,81 persen masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar jalur landasan pesawat terbang.

Selanjutnya, terdapat 0,87 persen masyarakat yang rumah berada di bawah kabel listrik SUTET.

Lalu, masyarakat yang menempati rumah di dalam radius 1 kilometer dari TPA Sampah terdapat 0,46 persen.

Terakhir, terdapat 0,39 persen masyarakat yang rumahnya berada di pinggir rel kereta api dengan jarak kurang dari 15 meter.

<https://www.kompas.com/properti/read/2023/09/04/210000021/pemerintah-pastikan-rumah-subsidi-dibangun-di-lokasi-yang-aman?page=all>





04 / 09 / 2023

Sumber: bisnis.com

---

## **Singapura dan Malaysia Minat Investasi di IKN, Ini Proyek yang Diincar**

Penulis: Alifian Asmaaysi

Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa dua negara anggota Asean yaitu Singapura dan Malaysia telah menyatakan minat untuk investasi di IKN.

Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, mengatakan bahwa proyek yang diincar para investor tersebut ialah apartemen, hotel hingga pusat hiburan. Agung menuturkan bahwa hingga saat ini minat investasi asing di IKN terus menunjukkan peningkatan.

"Terbanyak memang perusahaan dari Indonesia, lebih dari setengahnya. Kemudian dari Asean ada Singapura dan Malaysia. Yang lainnya, Jepang dan Korea," kata Agung dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (4/8/2023).

Lebih lanjut, khusus untuk negara Asean yakni Malaysia, terdapat dua perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun 20 tower apartemen di IKN. Dia menyebut, dua perusahaan yang berminat untuk membangun apartemen di IKN yaitu IGM Properties SDN BHD dan Maxin Global BHD.

Agung menjelaskan, saat ini dua perusahaan tersebut tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin memulai pembangunan. Untuk diketahui, sebelumnya perusahaan asal China yakni CCFG Corp yang tergabung dalam konsorsium Nusantara

bersama dengan PT Risjadson Brunsfield Nusantara juga dikabarkan akan turut serta membangun rusun ASN di IKN.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Haryo Bkti Martoyoedo, sebelumnya menuturkan bahwa konsorsium Nusantara juga saat ini tengah melangsungkan studi kelayakan sebelum melaksanakan groundbreaking.

"Sekarang mereka sudah memasukan FS [feasibility study] atau studi kelayakannya, kemudian sekarang sedang dirivew dan nanti akan dilihat," jelasnya.

Kendati demikian, proses studi kelayakan tersebut diperkirakan akan rampung tahun ini, bahkan bila memungkinkan akan dikebut penyelesaiannya pada bulan depan.

Konsorsium Nusantara yang terdiri dari CCFG Corp dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara akan membangun 60 tower rusun dengan investasi sebesar Rp30,8 triliun.

"Selesainya di 2024, cuma berapa banyak [yang terealisasi] ya tergantung kapan mulainya kan. Diharapkan Agustus 2024 akan ada upacara di sana, berarti sebelumnya kan harus sudah ada, makanya sekarang tinggal ngeliat waktunya," jelasnya.



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

04 / 09 / 2023

Sumber: bisnis.com

---

Haryo menjelaskan, secara garis besar, apartemen yang akan dibangun oleh dua konsorsium swasta ini akan memiliki desain dasar yang sama seperti 47 rusun ASN yang akan dibangun oleh pemerintah melalui APBN.

Di mana, desain dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR yang memiliki 12

lantai di setiap towernya dengan luas 98 meter persegi pada setiap unitnya.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230904/47/1691201/singapura-dan-malaysia-minat-investasi-di-ikn-ini-proyek-yang-diincar>



04 / 09 / 2023

Sumber: pu.go.id

---

## **Road to The 10 th World Water Forum 2024, Sekjen Kementerian PUPR Sampaikan Pentingnya Kolaborasi Pembiayaan Sektor Air**

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk terus meningkatkan kerja sama atau kolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan infrastruktur guna pengelolaan air yang lebih baik dan berkelanjutan. Inovasi pembiayaan alternatif tanpa membebani anggaran negara perlu dieksplorasi dalam mendukung penanganan permasalahan air baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah mengatakan salah satu tantangan dalam pengelolaan sumber daya air adalah kemampuan pendanaan pemerintah yang terbatas dan terdapat funding gap. Sesungguhnya pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan APBN hanya sekitar 30 persen, sehingga kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi hal penting untuk memenuhi funding gap sektor sumber daya air.

"Kami mendorong kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dalam penyediaan sumber daya air. Kami mengarahkan kebijakan dan tindakan kami pada prinsip-prinsip baru dan kolektif serta melaksanakannya secara kolaboratif," kata Sekjen Zainal Fatah dalam acara Indonesia Infrastructure Roundtable Ke-25 yang digelar di Universitas Brawijaya, Malang, Rabu (30/8/2023).

Acara Indonesia Infrastructure Roundtable Ke-25 ini sebagai bagian dari side event Sustainable Water Finance Subtheme, Road to the 10 th World Water Forum yang diselenggarakan di Bali tahun 2024. Diskusi yang mengambil tema 'Amplifying Partnership a Collaborative Drive to Strengthen Indonesia's Water Sector' tersebut menjadi substansi yang akan dibahas dalam WWF tahun 2024, sehingga diharapkan dapat mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dan berkomitmen dalam pembiayaan sektor air. "Kita akan mengeksplorasi berbagai model pembiayaan yang dapat mengatasi hambatan finansial, teknis, dan kelembagaan yang kita hadapi dan menemukan inspirasi untuk pengembangan dalam inovasi pembiayaan sektor sumber daya air," kata Zainal Fatah.

Menurut Zainal Fatah, innovative water financing menjadi isu dasar untuk menjamin ketersediaan air, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, pada WWF 2024 nanti diharapkan juga dapat menghasilkan sesuatu solusi bersama yang bisa disepakati di level dunia untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pengelolaan air.

"Ada hal penting yang menjadi perhatian kita bahwa kolaborasi dan kerjasama yang tidak dibatasi oleh batas-batas administratif, tetapi kita membuka diri untuk melakukan kolaborasi secara global antar negara dan tentu dengan multilateral development institution agar kita dapat mengambil manfaat yang lebih luas dari



04 / 09 / 2023

Sumber: pu.go.id

---

best perspektif yang telah ada dan dialami oleh mereka lebih dulu," kata Zainal Fatah.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, permasalahan air merupakan isu yang besar, dibandingkan dengan sektor lain, sektor air memerlukan perhatian khusus, dimulai dari kepastian tarif, koordinasi antar stakeholder dan juga perlu perubahan pendekatan kaitannya dengan bundling agar menciptakan ekonomi sirkular.

"Kendala utama dalam mencapai water for all adalah kesenjangan kebutuhan pendanaan dengan anggaran publik yang tersedia. Data menunjukkan terdapat funding gap untuk sektor air sebesar 70,4% dari 41 negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendanaan merupakan tantangan yang dihadapi secara global," kata Herry TZ.

Untuk itu, Herry menyampaikan kolaborasi merupakan kunci untuk memenuhi funding gap tersebut. Kemitraan yang melibatkan keuangan internasional hingga pihak swasta dapat memunculkan inovatif solutif untuk menyediakan infrastruktur air yang berkelanjutan.

"Skema KPBU di sektor air yang telah berjalan di Indonesia masih dibutuhkan penyempurnaan agar sustainable dan mampu lebih banyak menarik investasi," kata Herry TZ.

Turut hadir, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) M Wahid Sutopo dan Wakil Rektor Universitas Brawijaya Widodo.

<https://pu.go.id/kanal-gallery/2349>



04 / 09 / 2023

Sumber: inilah.com

---

## **Indonesia Kekurangan 12,7 Juta Rumah, Pengembang Makin Pede Garap MBR**

Author: Iwan Purwantono

Mungkin tak banyak yang tahu, kebutuhan masyarakat Indonesia akan rumah, masih sangat tinggi. Berdasarkan angka backlog perumahan di Indonesia, mencapai 12,7 juta unit. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum punya rumah layak.

Seperti disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, tahun ini, angka backlog di Indonesia mencapai 12,71 juta unit.

Tingginya angka backlog terjadi oleh beberapa faktor, namun yang paling umum penyebabnya adalah kesenjangan lebar antara proses pembangunan fisik rumah dengan populasi penduduk yang setiap tahun meningkat.

"Pemerintah telah melakukan sejumlah strategi untuk mengatasi persoalan backlog tersebut. Mulai dari peningkatan alokasi APBN untuk pembangunan perumahan rakyat, mempermudah pembiayaan perumahan, hingga pemberian berbagai skema subsidi seperti (SBUM), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan berbasis Tabungan (BP2BT) serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)." kata Herry, Jakarta, dikutip Senin (4/9/2023).

Di sisi lain, situasi ini membuat ada pasar besar yang menjadi opportunity besar bagi kalangan pengembang. Karena itu segmen

rumah subsidi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selalu diminati dan ada cukup banyak perusahaan developer yang mengembangkan segmen ini.

Salah satunya PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (Ingria) yang fokus dengan pengembangan segmen ini khususnya untuk memenuhi pasar perumahan MBR. Hal ini juga untuk mendukung program perumahan sejuta rumah hingga aktif dalam program perumahan pemerintah khususnya dalam mengatasi persoalan backlog.

"Ingria fokus untuk menjadi pengembang perumahan bagi segmen MBR yang kebutuhannya terus meningkat. Segmen ini kami garap sejak perusahaan ini didirikan tahun 2013 lalu hingga kami menjadi perusahaan terbuka (Tbk). Kami akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi segmen masyarakat menengah ke bawah dengan hunian berkualitas," ujar Eka Maolana, Corporate Secretary Ingria.

Saat ini, Ingria memiliki beberapa portofolio pengembangan proyeknya seperti di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemudian di Kecamatan Cimanggung dan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan berbagai lokasi lainnya hingga di luar Pulau Jawa seperti Samarinda.



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

04 / 09 / 2023

Sumber: inilah.com

---

Samarinda seperti juga kota-kota besar lainnya yang terus berkembang di Indonesia, membutuhkan banyak sarana hunian khususnya bagi kalangan MBR. Di Samarinda Ingria mengembangkan Perumahan New Mahakam Grande (NMG) yang berlokasi di Lok Bahu dengan pengembangan seluas 256.630 meter-persegi.

Kelebihan lainnya, lokasi NMG berada di pusat ekonomi dan hanya 30 menit ke pusat kota, 10 menit ke Islamic Center Samarinda, dan dekat ke Jalan Raya Juanda yang merupakan akses jalan utama di Kota Samarinda. Saat ini NMG telah mengembangkan seluas 195.295 m2 dan sudah banyak rumah yang diserahterimakan kepada konsumen.

Selain NMG, Ingria juga tengah menyiapkann pembangunan perumahan di

Mahakam Grande City (MGC) dengan lahan yang lebih luas mencapai 897.622 m2. Perumahan yang juga berlokasi di Samarinda ini ditargetkan memulai pengembangannya pada tahun 2024. Total Ingria telah mengembangkan 10 perumahan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Sumedang, Bandung, hingga Samarinda.

"Pasar yang besar membuat kami terus berkomitmen untuk meneruskan pengembangan di segmen MBR. Kendati begitu kami tetap mengutamakan lokasi strategis, kualitas bangunan, hingga berbagai fasilitas untuk kenyamanan penghuni," kata Eka.

<https://www.inilah.com/indonesia-kekurangan-127-juta-rumah-pengembang-makin-pede-garap-mbr>